



PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO

BOJONEGORO
produktif



Laporan Tahunan

PPID

Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lebih mengutamakan proses partisipasi yang produktif dari para pihak terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintah dan Badan Publik, sebagaimana deklarasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai Transparency and Government Accountability (TGA).


Dalam Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pemohon maupun Badan Publik bertanggungjawab terhadap informasi dan dokumentasi yang dikuasainya/ dikelola serta pemanfaatan atas informasi yang dimohon secara baik dan benar, apalagi di era digitalisasi saat ini banyak informasi yang disalahgunakan, bias dan hoax. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melakukan penguatan pada Badan Publik baik ditingkat OPD maupun Pemerintah Desa baik secara online maupun offline dengan menggunakan berbagai media baik cetak maupun media sosial.

Dengan berbagai terobosan dan inovasi Keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus membangun kepercayaan publik kepada pemerintah dan partisipasi masyarakat meningkat dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan cepat. Hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi Badan Publik Terbaik dan Terinformatif Tahun 2020 Se Jawa Timur.

Laporan Tahunan 2020 ini dibuat sebagai kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bermanfaat bagi para pihak.

Bojonegoro, 29 Maret 2021

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro

Ketua

Drs. NUR SUJITO, MM.
Pembina Tk.I

NIP. 19741013 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Executive Summary	1
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	5
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	10
1. Sarana dan Prasarana	10
2. Sumber Daya Manusia	24
3. Anggaran PPID	26
Bab III Rincian Data Pelayanan Informasi	28
1. Daftar Informasi Publik (DIP)	28
2. Permohonan Informasi Publik	33
3. Sengketa Informasi Publik	59
Bab IV Hambatan dan Cara Mengatasinya	61
1. Faktor Internal	61
2. Faktor Eksternal	62
Bab V Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	64
1. Regulasi	65
2. Kelembagaan	66
3. Sumber Daya Manusia (SDM)	67
Bab VI Dokumentasi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi PPID Corner Kabupaten Bojonegoro.....	12
Gambar	2	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pada Gedung Pusat Informasi Publik	13
Gambar	3	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Pada Mall Pelayanan Publik	14
Gambar	4	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Pembantu/OPD.....	15
Gambar	5	Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Desa	16
Gambar	6	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bojonegoro Pada Forum “Sambang Desa”	18
Gambar	7	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi “Ayo Mas Bro” Radio Malowopati FM	19
Gambar	8	Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi “Gowes Bareng Bupati”	20
Gambar	9	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro	25
Gambar	10	Layanan Informasi DIP pada Website PPID Kabupaten Bojonegoro	29
Gambar	11	Layanan Informasi DIP pada Website PPID OPD	29
Gambar	12	WhatsApp Group Posko Covid-19, Peta Sebaran dan Data Kumulatif	31
Gambar	13	WhatsApp Group Tanggap Bencana Pemkab Bojonegoro	32
Gambar	14	Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR!	56
Gambar	15	Laju tindak lanjut LAPOR!	57
Gambar	16	Topik Permohonan Informasi dan SKPD Terlapor Melalui LAPOR!	58
Gambar	17	Grafik Permohonan Informasi Melalui Forum Sambang Desa.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel	1	Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk	34
Tabel	2	Rincian Pelayanan Informasi pada Desk layanan Permohonan Informasi	34
Tabel	3	Alamat Medsos Pemkab Bojonegoro dan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro	59
Tabel	4	Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi	60



EXECUTIVE SUMMARY

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu Undang-Undang KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap

lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah membentuk PPID. Pembentukan PPID di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/111/KEP/412.013/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi hoax, maka pertanggung jawaban pengelolaan informasi menjadi hal yang sangat penting.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menguatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai *Transparency and Government Accountability* (TGA), yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara badan publik dengan pemohon informasi yang dimohonkan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana partisipasi masyarakat terhadap penguatan informasi aspirasi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu dengan maraknya penyampaian informasi *hoax*, maka pertanggungjawaban penyampaian informasi menjadi hal yang sangat penting.

Implementasi *Transparency and Government Accountability* (TGA) dilakukan dengan penguatan pengelolaan informasi mulai dari tingkat desa hingga pada seluruh jajaran OPD. Dalam *penguatan tersebut* yang diharapkan adalah terwujudnya kepercayaan (*trust*) dari semua pihak. Untuk itulah

dikuatkan dengan berbagai akses informasi. Akses informasi yang dikembangkan PPID Kabupaten Bojonegoro berupa :

1. Desk Layanan PPID statis yakni pada Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (PPID *Corner*), Gedung Pusat Informasi Publik, dan Gedung Mall Pelayanan Publik.
2. Desk Layanan PPID dinamis, yakni terdiri dari kegiatan Sambang Desa, Cangkrukan Karo Buk'e, Ayo Mas Bro, Cakrawala Pagi, Cakrawala Siang, Cakrawala Sore, SMS Malowopati.

Hasil dari pengelolaan pengaduan, aspirasi, permintaan informasi dan permohonan informasi dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan pembangunan, mulai proses musrenbang desa hingga tingkat kabupaten juga monitoring dan evaluasi pada semua OPD dan Desa. Untuk itu tindak lanjut yang berkelanjutan menjadi hal yang penting dan paling utama selain itu menunjukkan terciptanya komunikasi dua arah antara pemohon informasi dengan pengelola informasi.

Prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 meliputi :

1. Kategori Penyedia Informasi Berkala Terbaik Kab/Kota se-Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur;
2. Kategori Laporan Tahunan Terbaik Kab/Kota se-Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur;
3. Kategori Badan Publik Terinformatif Kab/Kota se – Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur;
4. Kategori Badan Publik Terbaik Kab/Kota se-Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur;
5. Kategori Penyedia Informasi Berkala Terbaik Desa se - Jawa Timur untuk Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang dalam PPID Award
6. Kategori Kategori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Desa se-Jawa Timur untuk Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur;

7. Kategori Penyedia Layanan Informasi Terbaik Desa se -Jawa Timur untuk Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur;
8. Kategori Badan Publik Menuju Informatif Terbaik Desa Se-Jawa Timur untuk Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang dan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur;

Pemerintah tidak berhenti melakukan inovasi dan penguatan terhadap layanan keterbukaan informasi publik , tahun 2021 kami akan melakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Perubahan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
3. Penguatan Admin PPID OPD melalui Bimbingan Teknis
4. Penguatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
5. Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Bojonegoro
6. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik SP4N-LAPOR! Melalui Bimbingan Teknis Admin LAPOR OPD
7. Monitoring dan Evaluasi PPID OPD melalui Website OPD
8. Pendampingan dan Pembinaan PPID Pemerintah Desa

Kegiatan diatas merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap *Transparency and Government Accountability (TGA)* sebagai bentuk implementasi KIP dan pelaksanaan dari misi ke-dua RPJMD Kabupaten Bojonegoro yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel selain itu juga diselaraskan dengan indikator kinerja utama RPJMD.



1

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) salah satunya menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Indonesia yang secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dan kepatuhan Kabupaten Bojonegoro pada beberapa regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pedoman PPID di lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 490/10006/SJ Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Melalui Aplikasi LAPOR!

Dalam pelaksanaan UUD 1945 Pasal 28 F juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan peraturan Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Untuk melayani informasi dan dokumentasi kepada publik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk 1 (satu) PPID Utama yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik dan PPID SKPD. Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan SKPD tertuang dalam Peraturan

Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang di dalam salah satu poinnya mengatur Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan informasi merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai dengan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- d. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- e. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
- f. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/111/KEP/412.013/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;
- g. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/038/412.45/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi Layanan Permohonan Informasi

Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati dan Media Cetak Serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro;

- h. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/068/412.45/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- i. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/0047/KEP/412.213/2018 tentang Standar Pengelolaan Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- j. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/096/KEP/412.213/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro;
- k. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/097/KEP/412.213/2019 tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.

Di era digitalisasi pemerintah menghadapi tantangan baru, yaitu tantangan tentang perubahan kultur SDM dalam pelayanan masyarakat secara konvensional menjadi berbasis elektronik, mewujudkan layanan yang lebih smart, serta terintegrasi dengan sebuah sistem yang terdukung teknologi informasi. Untuk itulah sebagai wujud peningkatan kualitas layanan yang modern, PPID Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk menciptakan layanan informasi berbasis elektronik melalui website, display layanan, form layanan online serta layanan informasi melalui media sosial dengan tujuan

menciptakan layanan informasi yang lebih cepat dan mudah, dengan tujuan Kabupaten Bojonegoro yang lebih produktif dan energik.

Layanan informasi dan data berbasis elektronik sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, telah diimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID), yang menjadi bagian mewujudkan Big Data serta ketersediaan Daftar Informasi Publik



2

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Melalui PPID Kabupaten Bojonegoro, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara professional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam memperkuat layanan informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan berbagai media yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, sebagai Badan Publik membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional baik ditingkat OPD maupun Pemerintah Desa. Guna mendorong dan memperkuat lahirnya kebijakan yang bertumpu pada aspirasi publik masyarakat dimohon untuk memanfaatkan hak nya untuk mengakses informasi.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan pelayanan informasi publik melibatkan Aparatur Sipil Negara yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dan beberapa dinas terkait yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Pelayanan dan pengelolaan informasi yang

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:

a. Desk Layanan Statis

Desk Layanan Statis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat menetap. Masyarakat dapat langsung mendatangi tempat yang disediakan untuk melakukan permohonan informasi. Desk Layanan Statis yang disediakan adalah :

- **PPID Corner (Ruang Layanan Informasi PPID Utama)** yang berlokasi di Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dengan alamat Lantai 1 (satu) Gedung Pemkab Bojonegoro, Jl. P. Mastumapel No.1 Bojonegoro. Pada desk layanan informasi ini, disediakan berbagai sarana prasarana penunjang sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010. Disamping itu, juga dilengkapi *display* informasi secara elektronik, yang di dalamnya berisikan berbagai informasi dasar, sebagai implementasi dari Daftar Informasi Publik, Bojonegoro Satu Data, dan berbagai fitur lainnya.

Pada PPID corner, ditempatkan petugas desk yang terhubung dengan Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berada pada Lantai 3 gedung tersebut. Hal ini memudahkan dalam memberikan kepastian layanan permohonan informasi.

Gambar 1

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
PPID Corner Kabupaten Bojonegoro



Ruangan desk layanan informasi pada PPID Corner Kabupaten Bojonegoro berukuran 5 x 5 meter, dilengkapi dengan set ruang tamu, desk pelayanan informasi, 1 buah Personal Computer terkoneksi internet, almari dan rak buku, leaflet, buku-buku seputar PPID, papan struktur organisasi, profil pejabat, alur permohonan informasi, alur keberatan, media interaktif, poster-poster jam layanan dan jenis layanan, 1 (satu) orang petugas desk layanan informasi dan formulir-formulir hard copy.

- **Ruang PPID Pusat Informasi Publik (PIP)** berlokasi di Jl. AKBP. M. Soeroko Nomor 11 Bojonegoro. Pada gedung PIP ini selain masyarakat dapat dilayani permohonan informasi, juga terintegrasi dengan Radio Malowopati FM (Sebagai Unit Reaksi Cepat Pelayanan Pengaduan), Media Center, serta Ruang *Smart Room/Command Center*.

Gambar 2

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Gedung PIP



- **Ruang Pelayanan Informasi pada Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP)** berlokasi di Jl. Veteran, di lokasi tersebut terintegrasi beragam layanan masyarakat, antara lain layanan dokumen kependudukan, perizinan, pertanahan, perbankan, sebanyak 199 jenis layanan dari 28 instansi yang terintegrasi, tidak terkecuali pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Pada Mall Pelayanan Publik tersedia Display Layanan Informasi Publik yang terkoneksi dengan internet. Display tersebut difungsikan sebagai Desk Layanan informasi online.

Gambar 3

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Mall Pelayanan Publik



- **Meja Layanan Informasi pada PPID Pembantu (PPID SKPD)**

PPID Kabupaten dan PPID OPD telah terkoneksi dengan jaringan internet dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID serta beralamat di masing-masing badan OPD yang terkoneksi dengan PPID Utama melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID, pada masing – masing OPD mempunyai Desk layanan informasi yang berada pada OPD terkait dengan sarana prasarana penunjang disesuaikan dengan sarana prasaran yang ada di PPID Utama.

Gambar 4

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Pembantu/OPD



- **Meja Layanan Informasi pada PPID Desa**

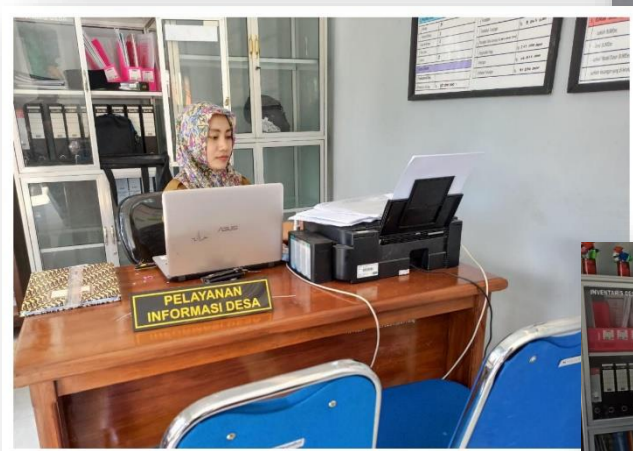
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Informasi sebagai dasar Implementasi PPID Desa. Hal tersebut dikarenakan antara PPID utama dan PPID Desa memiliki hubungan koordinatif, tidak menggunakan garis komando/struktural, sehingga dalam hal ini pelaksanaan TPID diketuai oleh sekretaris desa, dan sebagai atasan TPID adalah Kepala Desa.

Gambar 5

Desk Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Pada PPID Desa (TPID)



TPID Desa Prayungan



TPID Desa Kedungsumber



b. Desk Layanan Dinamis

Pada Desk Layanan Dinamis ini masyarakat dapat memperoleh layanan informasi yang bersifat mobile/ tidak menetap, tempat layanan disediakan pada berbagai event bisa di kecamatan ataupun desa dan ruang publik yang telah disediakan. Desk dinamis yang disediakan meliputi :

- **Sambang Desa**

kegiatan ” Sambang Desa ” Bupati Bojonegoro ini dalam setiap kali pelaksanaan mengambil tema dan narasumber sesuai dengan permasalahan atau isu strategis yang diangkat dari

inventarisasi berbagai media baik online maupun cetak dan juga media sosial.

Salah satu pelaksanaan Bupati Sambang Desa pada bulan September 2020, dilaksanakan di Desa Bondol Kecamatan Ngambon, sebuah desa dimana dilaksanakan proyek pembangunan jalan poros kecamatan antara Malo menuju Kedewan, yang disinyalir proyek tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh rekanan, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang berkembang di masyarakat seperti: debu saat panas dan becek saat hujan, jalur menjadi sulit untuk dilewati, perlunya buka tutup jalur, dan sebagainya. Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi isu negatif di masyarakat maupun media sosial.

Dalam menanggapi isu tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat secara langsung. Dengan tema utama pembangunan infrastruktur jalan, maka hadir Ibu Bupati bersama pejabat terkait, dengan narasumber Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang kemudian menjelaskan secara langsung serta mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat yang hadir atas ketidaknyamanan yang terjadi, namun juga memberikan solusi-solusi jangka pendek dan jangka panjang sampai dengan tuntasnya pembangunan jalan yang akan diselesaikan pada Tahun 2021 ini.

Pada pelaksanaan Sambang Desa, disediakan formulir layanan informasi, apabila dalam pelayanan ini tidak terselesaikan tuntas, permohonan informasi masyarakat dapat terlayani dalam sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR) sehingga relatif seluruh permohonan informasi dapat terlayani dengan baik.

Gambar 6

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro Pada Forum “Sambang Desa”



- **Program siar Cakrawala Pagi “Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif” (Ayo Mas Bro) Radio Malowopati**
 - Dinas Komunikasi dan Informatika membuat sebuah program siaran yang dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul dari masyarakat, untuk dapat direspon secara cepat dan akurat dari OPD, lembaga dan instansi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya masyarakat pedesaan , dimana media radio masih menjadi Layanan Informasi yang efektif, Penelitian juga

menunjukkan bahwa media yang efektif untuk pengaduan dan penyampaian informasi yaitu yang tertinggi adalah melalui media radio, kemudian muncul ide kreatif dari LPPL Radio Malowopati output dari program tersebut digunakan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang diambil, baik dari sisi penganggaran, prioritas kegiatan dan pengawasan.

Gambar 7

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
“Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif” (Ayo Mas Bro) Radio Malowopati



- **Gowes Bareng Bupati Bojonegoro**

Disela aktivitas harian beliau menyempatkan diri bersepeda bersama OPD, hal ini merupakan kegiatan rutin Bupati Bojonegoro , Gowes ini bukan hanya aktivitas berolahraga tetapi juga melakukan dialog dengan warga. Kegiatan yang berlokasi

di desa – desa di Kabupaten Bojonegoro tersebut menjangkir keluhan masyarakat yang memiliki isu utama pelayanan publik, meliputi pembangunan jalan, infrastruktur yang rusak, pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Gowes bersama Ibu Bupati Bojonegoro bersama OPD terkait dilaksanakan secara insidetil pada pagi , mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 07.30 WIB dimana masyarakat bisa menyampaikan secara langsung kepada Bupati tentang berbagai permasalahan yang perlu ditindaklanjuti secara cepat maupun diperlukan perencanaan anggaran dan eksekusi jangka panjang.

Gambar 8

Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi
“Gowes Bareng Bupati”



c. Akses Informasi

▪ Layanan Informasi berbasis elektronik

Layanan informasi berbasis elektronik pada website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan sub domain seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Khusus untuk informasi layanan PPID pada Website PPID Utama dapat dilakukan form permohonan informasi secara online. Layanan informasi PPID berbasis elektronik melalui website dan aplikasi dengan alamat sebagai berikut:

1. **Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**
(<http://bojonegorokab.go.id>)
2. **Website PPID Kabupaten Bojonegoro**
(<http://ppid.bojonegorokab.go.id>)
3. **Website PPID OPD (PPID Pembantu)** pada seluruh OPD (Dinas, Badan, Bagian, RSUD dan kecamatan) di lingkup pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki website dengan alamat domain resmi pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada website OPD tersebut memiliki menu PPID yang diisi layanan informasi dan Daftar Informasi Publik (DIP).

▪ Aplikasi LAPOR! 1708

Pemanfaatan aplikasi LAPOR! Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melayani berbagai pengaduan secara terintegrasi dari seluruh media layanan pengaduan.

Ada beberapa cara untuk penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! :

- (a) Menggunakan SMS: ketik BJN (spasi) isi laporan, kirim SMS ke 1708, lampirkan data dukung (foto, dan lain-lain)
- (b) Melalui Mobile Apps LAPOR! pada Android

- (c) Melalui situs www.lapor.go.id
- (d) Menggunakan twitter: login via twitter di www.lapor.go.id, sampaikan laporan di twitter dengan format #LAPORBJN (spasi) isi laporan, mention @pembkab.bjn

Sarana penyampaian pengaduan melalui aplikasi LAPOR! telah dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, baliho, umbul-umbul, banner dan lain-lain.

Kabupaten Bojonegoro senantiasa mempertahankan secara konsisten mengimplementasikan layanan pengaduan serta layanan informasi melalui mekanisme Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Terbukti pada tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Peringkat 4 Kategori Outstanding Achievement Penghargaan dari Kemenpan-RB sebuah penghargaan bagi lembaga pusat dan daerah yang menerapkan pengelolaan pengaduan dan pelayanan publik nasional.

- **Media Center Pemkab Bojonegoro**

Media Center merupakan bagian dari Gedung Pusat Informasi Publik (PIP) tepatnya pada lantai 1. Pada media center disiapkan sarana prasarana antara lain LED display, komputer dan ruangan dilengkapi perlengkapan pelatihan. Eksistensi Media Center diharapkan dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan antara lain mahasiswa, organisasi, komunitas dan kalangan kreatif sebagai sarana kolaborasi dan mengembangkan diri untuk berbagai aktivitas komunikasi dan layanan informasi.

- **Sistem Informasi Desa**

Sistem Informasi Desa adalah sebuah platform yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada seluruh Desa se Kabupaten Bojonegoro. Platform tersebut dibuat untuk memecahkan persoalan masih banyaknya desa yang belum

memiliki atau melakukan aktivasi website desa. Langkah pengembangan Sistem Informasi Desa antara lain melakukan aktivasi aplikasi dengan domain dan hosting disediakan oleh Dinas Kominfo, selanjutnya secara dilakukan pelatihan kepada admin desa tentang penggunaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa.

Mulai tahun 2019 seluruh desa sudah mengembangkan Sistem Informasi Desa , dilakukan pelatihan penggunaan, sedangkan pada tahun 2020 kemampuan admin akan ditingkatkan dalam penggunaan menu layanan desa dan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Sedang di Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan Penguatan SID melalui beberapa kegiatan diantaranya :

1. Pendampingan terhadap Operator SID Tingkat Desa Se Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemutakhiran Data Base Kependudukan.
3. Pemutakhiran Aplikasi SID yang di linkkan dengan beberapa layanan masyarakat seperti Sistem Bantuan Sosial, Pembayaran PB, Lawan Corona.

Untuk alamat Sistem Informasi Desa Kabupaten Bojonegoro dapat diakses melalui link smartbojonegoro.id

▪ **Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Diera digitalisasi saat ini masyarakat seringkali menggunakan dan memanfaatkan *Direct Message* Instagram dan *Facebook Messenger* hal ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu media layanan informasi dimana masyarakat juga bisa memberikan masukan, saran, kritik, keluhan dan berbagai pertanyaan terhadap sebuah informasi sekaligus menerima dan menjawab pertanyaan melalui kolom komentar, serta agenda-agenda Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat luas .

Media tersebut sangat bermanfaat bagi PPID Kabupaten untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung, sedangkan untuk pemanfaatan postingan/feeds media sosial, PPID Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkembang, isu, event, *ceremonial*.

2. Sumber Daya Manusia

a. Standar Operasional

Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, prosesnya dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi yang semuanya dilaksanakan oleh PPID Utama serta PPID Pembantu/OPD. Namun, sesuai dengan aturan yang ada, maka pada pelaksanaannya PPID Utama juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan berdasarkan regulasi yaitu: Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik, Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi serta Penyelesaian Sengketa Informasi. Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas harian, seksi Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari PPID Utama untuk mengelola dan melayani informasi publik.

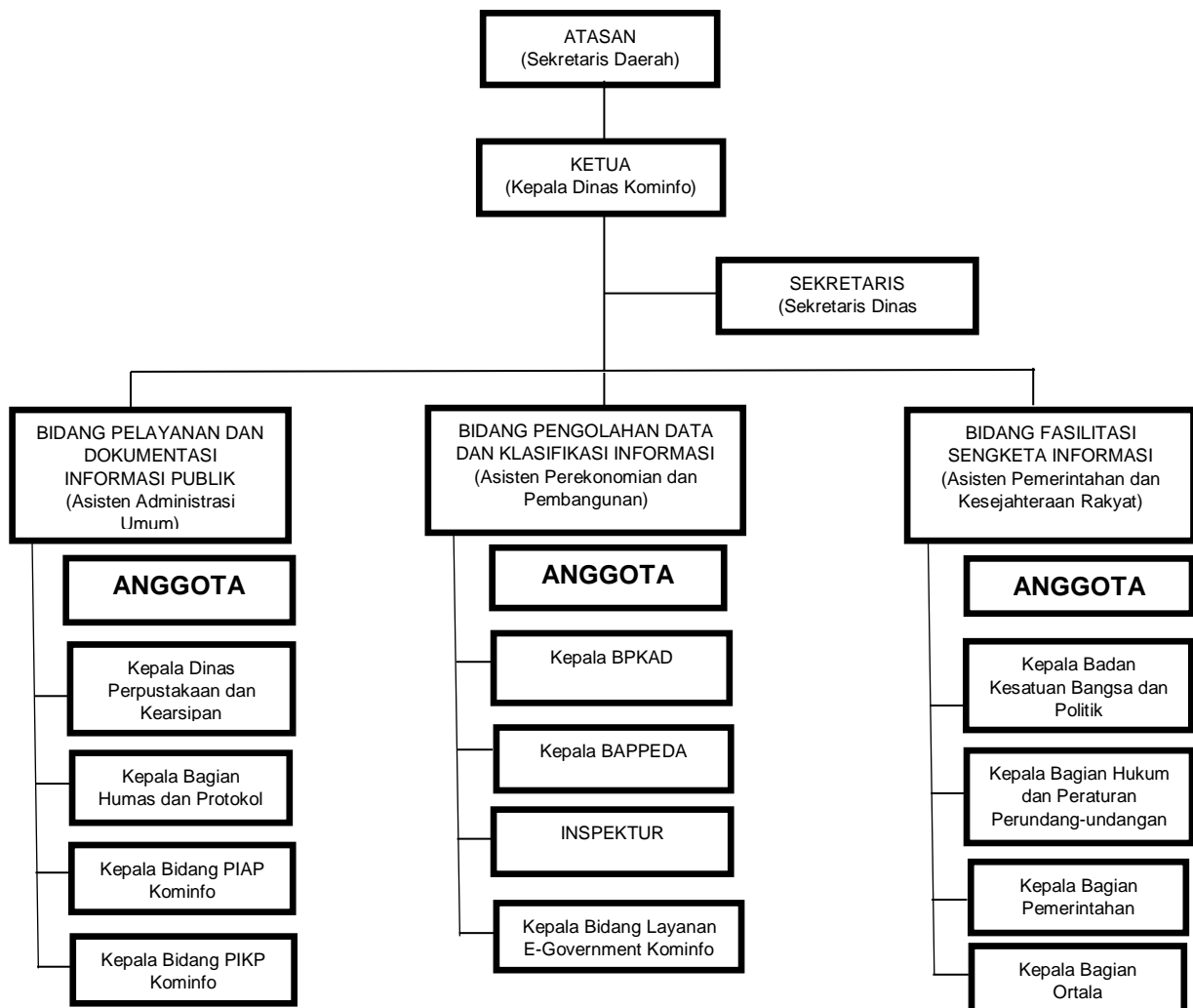
b. Pengelola Desk Layanan Informasi

Penyelenggaraan pengelolaan Desk Layanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 , bahwa struktur organisasi PPID Kabupaten terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD, selain itu pengelola desk layanan

juga dilaksanakan pada tingkat desa yang diatur melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Informasi Desa (TPID).

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Gambar berikut

Gambar 9
Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020



c. Penguatan PPID

Mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya menguatkan transparansi dan

akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyelenggarakan Penguatan PPID melalui Bimbingan Teknis admin pengelola PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh 1 orang Petugas Desk Layanan Informasi OPD se Kabupaten Bojonegoro, BUMD, Bawaslu dan KPU Bojonegoro. Narasumber yang memberikan pendalaman materi adalah Ketua Komisi Informasi Jawa Timur (Imadoeddin, S.Sos, M.Si), Komisioner (Edy Purwanto, S.Psi, M.Si) , Kadin Kominfo (Kusnandaka Tjatur P).

3. Anggaran PPID

a. PPID Utama

Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan untuk pelayanan informasi dan kegiatan PPID, pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 sebesar Rp. 2.589.777.000,- dan setelah Perubahan APBD sebesar Rp. 1.349.889.500,- sebagai berikut:

1. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 537.087.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 402.448.000,-
 - Pengembangan Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat sebesar Rp. 1.955.423.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 893.754.000,-
2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
 - Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, sebesar Rp. 97.267.000,- setelah PAPBD sebesar Rp. 53.687.500,-

b. PPID Pembantu OPD

PPID OPD penganggarnya ada pada Sekretariat masing-masing OPD yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

dalam hal ini pembiayaan yang disupport anggaran terkait pelaksanaan PPID Pembantu adalah dalam hal penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/laporan PPID Pembantu (PPID OPD).

c. PPID Desa

Pembiayaan yang terkait PPID Desa (Tim Pengelola Informasi Desa), dianggarkan pada APBDesa, adalah honor admin/pengelola website desa, honor Tim PPID Desa, penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/ laporan PPID Desa.



3 | RINCIAN DATA PELAYANAN INFORMASI

Kegiatan Rutin PPID Kabupaten Bojonegoro yaitu Pelayanan informasi publik baik yang datang langsung melalui meja layanan informasi, email, SMS, WhatsApp, Media Sosial, Forum Komunikasi Publik maupun melalui layanan elektronik website www.ppid.bojonegorokab.go.id secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Daftar Informasi Publik (DIP)

Pengelolaan DIP PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, dalam memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. PPID Kabupaten maupun PPID OPD/Pembantu telah melakukan pemuktahiran data dan mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) di website masing-masing Badan Publik. Sejumlah 199 Informasi DIP yang sudah diunggah diwebsite PPID sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala

Pada website masing- masing OPD terdapat sub menu PPID sebagai Implementasi pada DIP Berkala. Informasi yang tersedia meliputi program dan/atau kegiatan yang sedang berjalan selain itu pada website bojonegorokab.go.id pada website bpkad.bojonegorokab.go.id di menu transparansi .

Gambar 10
Layanan Informasi DIP pada Website PPID Kabupaten Bojonegoro

www.ppptd.bojonegoro.go.id
PPID KABUPATEN BOJONEGORO
Hak Anda Untuk Tahu!

Beranda Profil Layanan Informasi Informasi Publik Laporan PPID Transparansi Galeri Kontak

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BOJONEGORO

Home Daftar Informasi Publik Bojonegoro

Show 10 entries Search:

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
A. Profil Kabupaten Bojonegoro											
1	Sejarah Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang sejarah dan latar belakang berdirinya Kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download
2	Makna Lambang Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang arti dari bentuk, warna dan gambar yang terlekat pada lambang pemerintah kabupaten Bojonegoro	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download
3	Visi Misi Kabupaten Bojonegoro	Berisi Visi dan Misi kepemimpinan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download
4	Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	Berisi tentang gambaran umum letak geografis atau posisi Kabupaten Bojonegoro, Kondisi iklim Kabupaten Bojonegoro, Kondisi dan Jumlah Penduduk, Tata Pemerintahan	PPID		Softcopy	Berkala				5 Tahun	Link/Download

Gambar 11
Layanan Informasi DIP Pada Website PPID OPD

Selamat Datang di Portal Resmi Kecamatan Dander Bojonegoro © 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Kecamatan Dander

Home Profil Berita Agenda Galeri PPID

Home / DIP

DIP

Daftar Informasi Publik CONTOH.xlsx : Kabupaten Bojonegoro

No	Kode	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Secara Berkala	Setiap Saat	Serta Merta	Dikecualikan	Jangka Waktu Penyimpanan	Download
1	dnr.01	Kedudukan domesili dan alamat lengkap	Kedudukan domesili dan alamat lengkap Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (Terdiri dari Alamat, Nomor Fax/Tip, dan E-mail)	Sekretaris	Kec. Dander	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
2	dnr.02	Visi dan Misi	Berisi tentang Visi dan Misi Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Dander	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
3	dnr.03	Tupoksi	Berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Dander	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
4	dnr.04	Struktur Organisasi	Berisi Struktur Organisasi Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris	Kec. Dander	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
5	dnr.05	Gambaran umum satuan kerja	Berisi gambaran umum tentang Kecamatan Dander berdasarkan tugas dan fungsi serta kedudukan dalam Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.	Sekretaris	Kec. Dander	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download
6	dnr.06	Profil singkat pejabat struktural	Berisi tentang gambaran umum secara singkat pejabat pejabat struktural di Kecamatan Dander yang berisi tentang Nama, Nomor Tip. / HP	Sekretaris	Kec. Dander	Softcopy, hardcopy dan website	V				5 tahun	Download

DIP Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

b. Informasi yang wajib diumumkan secara Serta Merta

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah secara nyata menimbulkan dampak luar biasa signifikan yang telah memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dari seluruh masyarakat di dunia, bahkan telah merenggut jutaan nyawa masyarakat dunia termasuk rakyat Indonesia. Keberlangsungan pandemi Covid-19 tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Tidak ada satu pun negara di dunia yang terbebas Covid-19. Untuk itu diperlukan gotong royong dari seluruh otoritas di bidang perekonomian dan sektor keuangan dalam menghadapi ancaman yang sangat nyata tersebut.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun 2020 mengalokasikan dana khusus untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dana tersebut dikelola oleh beberapa instansi guna pencegahan Covid-19,” anggaran tersebut dipergunakan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Bojonegoro seperti ketersediaan disinfektan, masker, alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan, dan lain sebagainya secara teknis sudah ditangani oleh dinas kesehatan. Informasi terkait Covid-19 bisa dilihat pada website dengan link : <http://lawancorona.bojonegorokab.go.id/>

Dalam percepatan penanganan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah :

1. Protokol Kesehatan di semua lini diperketat
2. Operasi Yustisi diaktifkan kembali siang-malam.
3. Diberlakukannya kembali Jam malam, maksimal Jam 21.00 (Terutama Kecamatan Bojonegoro, Kapas, dan Dander
4. Mengaktifkan kembali tempat Karantina Desa.
5. Operasi Yustisi pada 8 Kecamatan dengan kasus aktif tertinggi (Bojonegoro, Kapas, Dander, Balen, Sumberejo, Kalitidu, Sukosewu, Kedungadem), dengan mekanisme saat terjaring tidak menggunakan masker maka dilakukan pemeriksaan Rapid Test ditempat, bila hasilnya Reaktif, yang bersangkutan segera diantar ke Tempat Karantina Desa.

6. Tempat Umum seperti Pasar baik milik pemerintah ataupun swasta diperketat penerapan protokol kesehatannya.
7. Penambahan tempat tidur di RSUD.
8. Dinas Kesehatan dan PMI saling koordinasi untuk identifikasi yang telah sembuh dari Covid-19 untuk donor plasma Konvalesen.

Gambar 12
WhatsApp Group Posko Covid-19 , peta sebaran dan data kumulatif

POSKO COVID-19 BOJONEGORO
Anief, Bapak, Spod P, yud, Bpk Helmi, Bpk Masirin, Bpk Surahmat, Bu Ani, Bu, Bu, Djar, Djoko, Dr, Hest

Posko Bpbd Adnan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro
bpbd.bojonegorokab.go.id

LAPORAN KEGIATAN BPBD KABUPATEN BOJONEGORO PENANGANAN DARURAT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN BOJONEGORO

Selamat Siang, mohon ijin melaporkan dengan hormat Kegiatan Penanganan Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bojonegoro pada hari ini Sabtu, 26 Desember 2020

A. JENIS KEGIATAN :

- Penyemprotan Disinfektan guna Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
- Pembagian paket sembako dan masker

B. WAKTU KEGIATAN :
Hari/tanggal : Sabtu, 26 Desember 2020
Pukul : **08:30 wib s/d 10.00 wib**

C. LOKASI KEGIATAN :

1. Jl. Monginsidi
2. Stasiun kereta api
3. Terminal Rajelwas
4. RSUD Soedoro Djatikoesomo
5. Jl. Veteran
6. Jl. Pemuda
7. Jl. Lettu Suwolo
8. Pasar Hewan

D. UNSUR YANG TERLIBAT

- BPBD BOJONEGORO
- DAMKAR
- TNI
- POLRI

E. UPAYA YANG DILAKUKAN

1. Memberikan himbauan tentang bahaya Penyebaran Covid-19
2. Sosialisasi Hidup Bersih selalu Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak Saat Beraktivitas
3. Melakukan Penyemprotan Disinfektan.
4. Pembagian sembako kepada pedagang kopi warung-warung kecil dan tukang becak
5. Pembagian masker kepada tukang becak

F. PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan yang dapat disampaikan, Salam Tangguh Salam Kemanusiaan & Semangat .

G. BPBD KABUPATEN BOJONEGORO
Alamat : Jl. A. Yani No. 06 Bojonegoro, Jawa Timur
Telephone : (0353) 887811
E-Mail : bpbd.bjn@gmail.com
WA/Telegram : +628113356444
Website : <http://bpbd.bojonegorokab.go.id>
Instagram : @bpbd_bojonegoro
Twitter : @bpbdbjn
Facebook : Pusdalops Bpbd Bojonegoro

Peta Sebaran Konfirmasi Covid-19 Aktif di Kabupaten Bojonegoro
Par 611 | Desember 2020 | Pukul 19.00 WIB

Call Center : 0856-6603-3504

DATA KUMULATIF COVID-19 KABUPATEN BOJONEGORO
31 Desember 2020 - Pukul 18.00 WIB

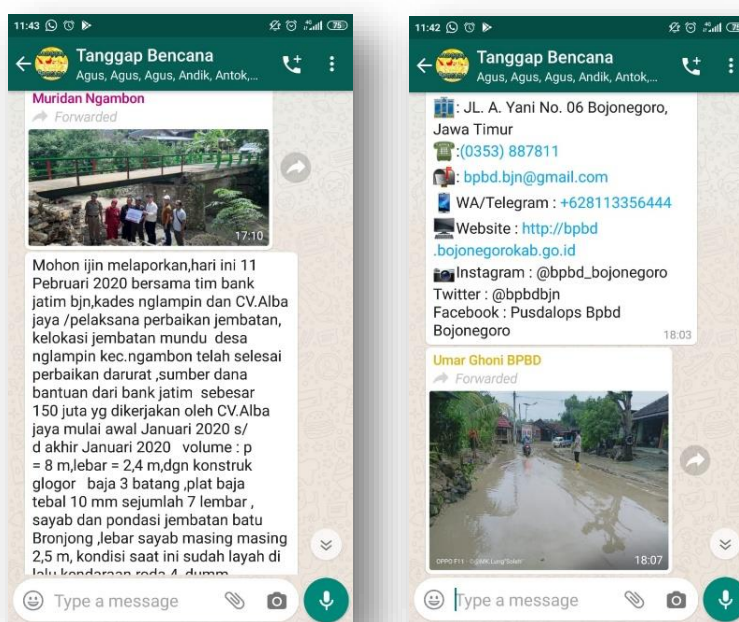
Suspect 332

Konfirmasi 1287

Aktif	Sembuh	Meninggal
227	967	93

Selain informasi mengenai Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro ada juga Group WhatsApp yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro setiap ada informasi tentang bencana dapat langsung dipublikasikan melalui berbagai akses informasi untuk diketahui masyarakat, hal ini juga berlaku pada informasi serta merta lainnya.

Gambar 13
Whatsapp Group Tanggap Bencana Pemkab Bojonegoro



c. Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat

Pada Desk Layanan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga pada website resmi Bojonegoro <http://bojonegorokab.go.id/>, Website PPID Bojonegoro <https://ppid.bojonegorokab.go.id/> tersedia informasi wajib yang tersedia setiap saat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 14 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 13. Sedangkan informasi terkait anggaran ada pada Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bojonegoro pada Menu Transparansi
<http://bpkad.bojonegorokab.go.id/transparansi/> atau

<http://apbd.bpkad.id/apbd.php/tabel/item/2020>

d. Informasi yang dikecualikan.

Dalam hal informasi yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bersama Atasan PPID melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan dalam hal ini informasi yang dikecualikan berupa :

1. Dokumen informasi kwitansi pembayaran kegiatan barang dan jasa.
2. Rincian Dokumen Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal itu sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tanggal 10 April 2019 Nomor 188/095/KEP/412.213/2019 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.

2. Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2020 ini, informasi yang paling banyak dimohon melalui saluran layanan informasi desk PPID dan juga melalui saluran layanan SMS/WA Radio Malowopati FM serta layanan online adalah mengenai pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk saluran layanan desk informasi dinamis melalui forum Sambang Desa adalah seputar Infrastruktur dan pemerintahan.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Layanan Informasi Langsung Melalui Desk
Tahun 2020

Bulan	Jumlah Permohonan	Pelayanan (hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum Di kuasai	Lain nya
1	4	3	3	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	0
3	9	2	8	1	0	0	0	0
4	6	0	6	0	0	0	0	0
5	4	+10	4	0	0	0	0	0
6	5	0	5	0	0	0	0	0
7	5	+10	5	0	0	0	0	0
8	3	1	3	0	0	0	0	0
9	3	+10	3	0	0	0	0	0
10	4	0	4	0	0	0	0	0
11	2	5	2	0	0	0	0	0
12	7	+10	6	1	0	0	0	0
JML	53		51	2	0	0	0	0

Berdasarkan table 1 diatas menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi berjumlah 53 (lima puluh tiga) atau 100%, dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan informasi dan dokumentasi di Desk Layanan Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro dapat terlayani seluruhnya.

Secara rinci permohonan informasi melalui desk layanan permohonan informasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Pelayanan Informasi pada Desk Layanan Permohonan Informasi

NO REGISTER	PEMOHON	ALAMAT	ISI PERMOHONAN	KEGUNAAN	STATUS	WAKTU LAYANAN (HARI)
1	2	3	5	6	7	8
001/I/P PID/BJN /2020	Sugianto	Dsn. Ngemplak Rt. 09 Rw.006 Ds. Tambakrejo Kec. Tambakrejo HP. 0812304696 37	1. DPA APBDes Ds. Tambakrejo Thn 2018 Kec. Tambakrejo 2. Berita acara lelang tanah kas desa (TKI) Ds. Tambakrejo Kec. Tambakrejo 3. Persiapan PTSL Thn 2020 Ds. Tambakrejo Kec. Tambakrejo	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	7
002/I/P PID/BJN /2020	M. Nur Hayan	Ds. Krajan Rt. 11 Rw. 005 Kec. Sugihwaras HP. 0822640519 60	1. APBD & RAPBD Thn 2019 2. Laporan realisasi APBD 2019 3. Laporan realisasi KPM 2019	Pembel ajaran dan Bahan Kajian Organis asi	Terpenuhi	4
003/I/P PID/BJN /2020	Gitari Putri Permadani	Ds. Ngampel Rt. 1 Rw. 1 Kec. Kapas HP. 0857324965 24	1. Lapor khusus Sambang Desa 2. Struktur Sambang Desa 3. Jadwal Sambang Desa	Skripsi	Terpenuhi	1
004/I/P PID/BJN /2020	Kevin Adi Prajogo	Dsn. Mangkul Rt. 19 Rw. 006 Ds. Bareng Kec. Sugihwaras HP. 0852349601 67	Daftar data- data dinas / badan se Kab Bojonegoro	Skripsi	Sudah terpenuhi lewat WA (17/1/20)	1

005/III/ PPID/BJ N/2019	Siti Ariyanti	Jln. Dr. Setyobudi II- 72 Klagon Bojonegoro HP. 0823354236 93	1. Buku Pertanggungja waban APBD Tahun 2016 (Buku I) 2. Buku Pertanggungja waban APBD Tahun 2017	Untuk meleng kapi data penduk ung pendiri BUMD baru Kabupa ten Bojone goro	Terpenuhi	2
006/III/ PPID/BJ N/2020	Dinda Aulia Rahmanda	Ds. Sonorejo Rt.008 Rw. 003 Kec. Padangan HP. 0823319971 54	Data terkait tata kelola teknologi informasi	Peneliti an tugas akhir skripsi	Terpenuhi	1
007/III/ PPID/BJ N/2020	Sugianto	Dsn. Ngemplak Rt. 09 Rw.006 Ds. Tambakrejo Kec. Tambakrejo HP. 0812304696 37	1. DPA APBDes Ds. Sidorejo Kec. Padangan Thn 2017, 2018 & 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa (TKD) Ds.Sidorejo Kec. Padangan Thn 2017, 2018 & 2019 (beserta dokumen pendukung)	Diarah kan pada PPID Pemer ntah desa dengan difasilit asi PPID Kecam atan	Terpenuhi	7

008/III/ PPID/BJ N/2020	Gunaidik	Dsn. Petak Rt. 11 Rw. 06 Ds. Begeed Kec. Gayam HP. 0823352324 34	1. Laporan penerimaan pajak hiburan dari "Cafe Gets" Thn 2018 (beserta dokumen pendukung) 2. Laporan penerimaan pajak hiburan dari "Cafe Damai" Thn 2018 (beserta dokumen pendukung) 3. Laporan penerimaan pajak hiburan dari "Cafe Pazia" Thn 2018 (beserta dokumen pendukung) 4. Laporan penerimaan pajak hiburan dari "Cafe centro" Thn 2018 (beserta dokumen pendukung)	Permohonan informasi ditolak karena "wajib pajak seseorang tidak boleh di publikasikan" karena sesuai dengan UU no 28	Ditolak	10
009/III/ PPID/BJ N/2020	Miftakul Ulum	Dsn. Gadung Rt. 017 Rw. 006 Kec. Purwosari HP. 0821416619 23	1. DPA APBDes Ds. Ngunut Kec. Dander Thn anggaran 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Ngunut Kec. Dander Thn 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	10

010/III/ PPID/BJ N/2020	Wisnu Nugroho Pamungkas	Ds. Kricak Rt. 005 Rw. 002 Kel. Kedungsum ber Kec. Temayang HP. 0822440044 58	1. DPA APBDes Ds. Temayang Kec. Temayang Thn anggaran 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkok ds. Temayang Kec. Temayang Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	10
011/III/ PPID/BJ N/2020	Wari	Dsn. Bancer Rt. 03 Rw. 001 Ds. Bancer Kec. Ngraho Hp. 0857087116 17	1. DPA APBDes Ds. Jarwik Kec. Tambakrejo Th. Anggaran 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkok Ds. Jarwik Kec. Tambakrejo Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	10
012/III/ PPID/BJ N/2020	Gunaidik	Dsn. Petak Rt. 11 Rw. 06 Ds. Beged Kec. Gayam HP. 0823352324 34	1. DPA APBDes Ds. Ngrancang Kec. Tambakrejo Th. Anggaran 2017, 2018 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	1

			bengkak Ds. Ngrancang Kec. Tambakrejo Thn 2017, 2018 (beserta dokumen pendukung)			
013/III/PPID/BJN/2020	Aditiya Dwi Ferdiansyah	Jln. KH. Zainal Alim Gg. II No.02 Ds. Kemayoran Bangkalan HP. 085892576742	Dinas dan Badan yang ada di Kabupaten Bojonegoro	Untuk kebutuhan penelitian tugas akhir	Terpenuhi	1
014/IV/PPID/BJN/2020	Nila Oktaria	BPS Kab. Bojonegoro HP. 081335732331	Survey BPS Kab. Bojonegoro	SE terkait Covid 19	Terpenuhi	10
015/IV/PPID/BJN/2020	Yesi Arofa	Dsn. Kalipan Rt. 003 Rw. 005 Ds. Duyungan Kec. Sukosewu HP. 081217283449	LPJ Desa Tembeling tahun 2017-2019	Bahan Rilis Berita	Ditolak	7
016/IV/PPID/BJN/2020	Ista'm Manaf	Dsn. Sidokumpul Rt. 034 Rw. 10 Ds. Leran Kec. Kalitidu HP. 082196183852	Penggunaan dana APBDes Desa Leran Tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019	Komparasi, relevansi, equivalensi antara data dengan realisasi yang ada serta sebagai bahan acuan untuk evaluasi dlm	Terpenuhi	7

				penyerapan Dana APBDes utk tahun anggaran berikutnya.		
017/IV/PPID/BJN/2020	Sukamto	Dk. Piji RT. 001 RW. 007 Ds. Sumberjo Kec. Margomulyo HP.085701362633	1. DPA APBDes Ds. Meduri Kec. Margomulyo Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Meduri Kec. Margomulyo Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	10
018/IV/PPID/BJN/2020	Hartoyo	Dk. Kedungringin RT. 006 RW. 002 Ds. Bancar Kec. Ngraho HP.085229033974	1. DPA APBDes Ds. Jawik Kec. Tambakrejo Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Jawik Kec. Tambakrejo Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	10

019/IV/ PPID/BJ N/2020	Gunaidik	Dsn. Petak RT. 11 RW. 06 Ds. Beged Kec. Gayam HP. 0823352324 34	1. DPA APBDes Ds. Beged Kec. Gayam Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. DPA APBDes Ds. Katur Kec. gayam Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 3. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Katur Kec. Gayam Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	10
020/IV/ PPID/BJ N/2020	Wisnu Nugraha Pamungkas	Dk. Ricak RT. 05 RW. 02 Ds. Kedungsum ber Kec. Temayang HP. 0822440044 58	1. DPA APBDes Ds. Ngujung Kec. Temayang Thn 2017, 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Ngujung Kec. Temayang Thn 2017, 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	1
021/V/P PID/BJN /2020	Gita Putri Permadani	Desa Ngampel RT. 01 RW. 01 Kec. Kapas	Dana Sambang Desa Tahun 2020	Skripsi	Terpenuhi melalui Tlp dan melihat Website	1

022/V/P PID/BJN /2020	Anggi Putra Ferdiansya h	Gang Bader No.12 RT. 16 RW. 03 Kel. Ngrowo Kec. Bojonegoro	E-KTP sudah buram tidak bisa digunakan traksaksi on- line di Bank dll, Bagaimana cara mendapatkan E-KTP baru, Apakah harus mengurus sendiri sekarang saya tinggal dan bekerja di Kabupaten Bekasi	Agar menda apatkan E-KTP baru	Terpenuhi melalui Tlp, WA, dengan melihat dokumen	2
023/V/P PID/BJN /2020	Hafida Aamadea Dewi	Perum Wonokusu mo Indah Blok a/5 RT. 4 RW. 6 Kec. Semampir Kel. Pegirian Surabaya	LAKIP TAHUN 2019 dan APBD 2020	Peneliti an Skripsi	Terpenuhi	3
024/V/P PID/BJN /2020	Ketua LSM Link Kontrol (Muharton o)	Jln. Singonggolo No.03 Ds. Sabontoro Kec. Balen HP. 0812163858 40	APBDes Desa Kalirejo Kec. Ngraho Tahun 2017-2019	Study Bandin g	Terpenuhi	2
025/VI/ PPID/BJ N/2020	Aditiya dwi Ferdiansya h	Jln. KH. Zainal Alim Gg. II No.02 Ds. Kemayoran Kab. Bangkalan HP. 0858925767 42	Data mengenai jumlah pejabat / pegawai pengelola keuanganPpem kab Kabupaten Bojonegoro	Skripsi / tugas akhir	Terpenuhi	3
026/VI/ PPID/BJ N/2020	Ketua LSM Link Kontrol (Muharton o)	Jln. Singonggolo No.03 Ds. Sabontoro Kec. Balen	Rincian APBDDes Desa Mojodelik Kec. Gayam Tahun 2017, 2018, 2019	Study Bandin g	Terpenuhi	10

		HP. 0812163858 40				
027/VI/ PPID/BJ N/2020	MOCH NASIHIN	RT. 003 RW. 001 Ds. Brangkal Kec. Kepohbaru	1. DPA APBDes Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru Thn 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Kepoh Kec. Kepohbaru Thn 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	10
028/VI/ PPID/BJ N/2020	SUGIANTO	RT. 019 RW. 001 Dsn. Ngembak Ds. Tambakrejo Kec. Tambakrejo	1. DPA APBDes Ds. Bondol Kec. Ngambon Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Bondol Kec. Ngambon Thn 2018,2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	10
029/VI/ PPID/BJ N/2020	Muhamma d Alfian Syahrul Izza	Jln. Serma Abdulah no 143 RT. 005 RW. 001 Ds. Pacul Bojonegoro	1. Data surat menyurat/ administrasi Sambang Desa Ds. Mlideg Thn. 2019 2. Jadwal Sambang Desa Thn. 2019 3. Data	Peneliti an Tugas Akhir	Terpenuhi	5

			Pengaduan masyarakat			
030/VII/PPID/BJN/2020	WARI	RT. 003 RW. 001 Dsn. Bancor Dsn. Bancor Kec. Ngraho	1. DPA APBDes Ds. Sukorejo Kec. Tambakrejo Thn 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Sukorejo Kec. Tambakrejo Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan BKD Jembatan Plimping Thn. 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	4
031/VII/PPID/BJN/2020	Irawan	RT. 004 RW. 002 Dsn. Betet Dsn. Betet Kec. Kasiman	1. DPA APBDes Ds. Tembeling Kec. Kasiman Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Tembeling Kec. Kasiman Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	4

032/VII/ PPID/BJ N/2020	Gunaidik	RT. 11 RW. 06 Dsn. Petak Ds. Beged Kec. Gayam HP. 0823352324 34	1. DPA APBDes Ds. Nguken Kec. Padangan Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung) 2. Berita Acara Lelang TKD dan Eks Bengkok Ds. Nguken Kec. Padangan Thn 2018, 2019 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	4
033/VII/ PPID/BJ N/2020	Oyong Priangkoso	Sorogo RT. 02 RW. 06 Kel. Ngelo Kec. Cepu Kab. Blora	1. Salinan Dokumen RPJM Desa Turi Kec. Tambakrejo Tahun 2014 2. DPA APBDes Ds. Turi Kec. Tambakrejo Thn 2015, 2016 dan 2017 (beserta dokumen pendukung 3. Berita acara lelang tanah kas desa dan tanah eks bengkong Ds. Turi Kec. Tambakrejo Thn 2015, 2016 dan 2017 (beserta dokumen pendukung)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	6

034/VII/ PPID/BJ N/2020	Drs. Wakitur	Ds. Ngujung RT. 012 RW. 002 Kec.Temaya ng	<p>1. Dok APBD Ds. Ngujung Kec. Temayang Thn 2016 dan Thn 2020 (beserta dokumen pendukung)</p> <p>2. Dok Berita Acara kegiatan lelang tanah bengkok Thn 2017-2019 (beserta dokumen pendukung)</p> <p>3. Dok Berita acara pengelolaan BUMDES Thn 2017-2019 (beserta dokumen pendukung)</p> <p>4. Dok Berita acara kegiatan pengelolaan dana PUAP Thn 2017-2019 (beserta dokumen pendukung)</p> <p>5. Dok Berita Acara kegiatan pembelian / pengadaan bibit jambu biji merah Thn 2017 (beserta dokumen pendukung) dan dok kegiatan penanaman jambu biji merah Thn 2018 (beserta dokumen pendukung)</p>	Untuk memba ntu Pemer ntah menga wasi dan mengo ntrol pelaksa naan tata kelola Pemer ntah Desa	Terpenuhi	7
-------------------------------	-----------------	---	--	---	-----------	---

035/VIII /PPID/B JN/2020	Muhammad Nur	Graha Suryanata Pakal Surabaya	<p>1. Data jumlah penduduk yang bekerja (angkatan kerja) berdasarkan jenis profesi pada tingkat Kecamatan di Kab. Malang tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019</p> <p>2. Data jumlah lapangan pekerjaan pada tingkat Kecamatan Kab. Malang tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019</p>	Info tersebut akan digunakan sebagai data pendukung pada pekerjaan pendampingan teknik transportasi jangka panjang 2020-2022 periode 2020 antara PT jasa Marga Persero dengan UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan UI	Terpenuhi lewat HP/WA	6
036/VIII /PPID/B JN/2020	Primi Putri	Jln. Sosio Yustisia No.1 Bulak Sumur Depok, Sleman DIY	<p>1. Data Permohonan informasi PPID 2016-2020 (dokumen tahun 2017 pada zaman ini tidak bisa diakses)</p> <p>2. data permohonan komplain saran,</p>	Penelitian untuk disertasi doctoral	Terpenuhi lewat Email/ HP	1

			informasi diaplikasi siap lapor 2013-2018 3. Dokumen kegiatan dialog publik "Sobo Pendopo" (pertanyaan, komplin, saran yang disampaikan warga tahun 2008-2018			
037/VIII/PPID/BJN/2020	Muhammad Nur	KPR BPD Kota Sorong Papua Barat	1. Jumlah penduduk yang bekerja (angkatan kerja) untuk tiap jenis profesi pada tingkat Kelurahan/ Kecamatan di wilayah Kab. Bojonegoro tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 2. Jumlah lapangan pekerjaan pada tingkat Kelurahan/ Kecamatan wilayah Kab. Bojonegoro tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Sehubungan dengan pelaksanaan pendampingan Teknik Transportasi jangka panjang 2020-2022 (periode 2020) antara PT Jasa Marga Persero TBK dengan UP2M Teknik Sipil dan Lingkungan FTUI	Terpenuhi lewat HP/WA	4
038/IX/PPID/BJN/2020	H. Ibnu Sujanto	Jln. Kolonel Sugiono Gg. Kakatua 7 Kab. Bojonegoro	Data Ibu Bupati (Riwayat Hidup Singkat) dari Foto Folio	Diusulkan Setya Lencana (Lequin	Terpenuhi lewat HP/WA	4

				Veteran RI)		
039/IX/PPID/BJN/2020	Gunaidik	Dk. Petak RT. 011 RW. 006 Ds. Beged Kec. Gayam Kab. Bojonegoro	<p>1. Berita Acara Kesepakatan Kades Sembung Kec. Kapas dengan PBD tentang penyusunan RAPBDes dan PAPBDes Ds. Sembung Kec. Kapas Tahun Anggaran 2019 dan 2020</p> <p>2. Surat Permohonan Kades Sembung kepada Camat Kapas tentang Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes tahun anggaran 2019 dan 2020</p> <p>3. Surat Camat Kapas kepada Kades Sembung tentang Hasil Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes tahun anggaran 2019 dan 2020</p> <p>4. DPA APBDes Ds. Sembung Kec. Kapas tahun 2019 (beserta dokumen pendukungnya)</p> <p>5. Berita Acara Lelang TKD Ds. Sembung Kec.</p>	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	4

			Kapas tahun 2019 (beserta dokumen pendukungnya)			
040/IX/PPID/BJN/2020	<i>Irawan</i>	Dsn. Betet RT. 004 RW. 002 Ds. Betet Kec. Kasiman	1. Berita Acara Kesepakatan Kades Kacangan Kec. Malo dengan PBD tentang penyusunan RAPBDes dan PAPBDes Ds. Kacangan Kec. Malo Tahun Anggaran 2019 dan 2020 2. Surat Permohonan Camat Malo kepada Kades Kacangan tentang Evaluasi RAPBDes Tahun anggaran 2019 dan 2020	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	4
041/X/PID/BJN/2020	Moch Habib Thoifur	Dk. Janar RT. 008 RW. 004 Ds. Nglumber Kec. Kepohbaru	1. Dokumen Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Baureno-Kepohbaru tahun 2020 (Beserta RAB dan Gambar Teknik) 2. Berita Acara Pekerjaan Peningkatan Jalan Kepohbaru-Gungsari tahun 2020 (Beserta RAB dan Gambar Teknik)	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi	6

042/X/P PID/BJN /2020	Reni Wulandari	Ds. Karangdayu RT. 001 RW. 001 Kec. Baureno	UUD RI No. 14 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah RI, No. 61 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi , No. 1 Tahun 2010	Refensi Berita	Terpenuhi	2
043/XI/ PPID/BJ N/2020	Zaenal Abidin	Ds. Kuniran RT. 3 RW.1 Kec. Purwosari	1. DPA APBDes Ds. Kuniran Kec. Purwosari Thn 2017, 2018, 2019 dan tahap 1 dan tahap 2 Thn 2020 (Beserta dokumen pendukung) 2. Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa (TKD) Ds. Kuniran Kec. Purwosari Thn 2017, 2018, 2019 (Beserta dokumen pendukung) 3. Anggaran bantuan Kelompok Tani Didn't Ds. Kuniran Kec. Purwosari Thn. 2019 dan 2020	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi (Tidak bisa diproses karena data dukungny a tidak lengkap)	7

044/XI/ PPID/BJ N/2020	Gunaidik	Dk. Petak RT. 011 RW. 006 Ds. Baged Kec. Gayam Kab. Bojonegoro	1. Berita Acara Kesepakatan Kades Pumpungan Kec. Kalitidu dengan PBD tentang : Penyusunan RAPBDes, APBDes dan PAPBDes Desa Pumpungan Kec. Kalitidu tahun anggaran 2019 2. Surat Permohonan Kades Pumpungan kepada Camat Kalitidu tentang : Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes Desa tahun anggaran 2019 3. Surat Camat Kalitidu kepada kades Pumpungan tentang : Hasil evaluasi RAPBDes dan PAPBDes tahun anggaran 2019	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	4
045/X/P PID/BJN /2020	Nopi Dwi Indah Sari	Balun Sawahan LR I A Cepu	Aplikasi Siap Lapor	Untuk pemen uhan tugas akhir	Terpenuhi	1
046/X/P PID/BJN /2020	Idham Katon Winahyu	Selakon Jawa Tengah	1. Laporan realisasi anggaran Kab. Bojonegoro Tahun 2018 2. LAKIP/ LKJIP Tahun 2019	Peneliti an Skripsi	Terpenuhi 2x lewat email	6

			Kab. Bojonegoro			
047/XII/ PPID/BJ N/2020	Fitri Aprilia	Jl. Lisman Gg. Buntu 3 No. 60 Campurejo	Data Demografi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019	Untuk data pembu atan Renstr a KPU Kabupa ten Bojone goro Tahun 2020- 2024	Terpenuhi lewat Email/ HP	1
048/XII/ PPID/BJ N/2020	Wari	Dk. Bancer RT. 003 RW. 001 Ds. Bancer Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro	1. Berita Acara Kesepakatan Kades Mojorejo Kec. Ngraho dengan BPD tentang Penyusunan RAPBDes, APBDes dan PapbDes Desa Mojorejo Kec. Ngraho tahun anggaran 2019. 2. Surat permohonan Kades mojorejo kepada Camat Ngraho tentang Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes tahun anggaran 2019. 3. Surat Camat Ngraho kepada Kades Mojorejo tentang Hasil Evaluasi RAPBDes, APBDes tahun anggaran 2019.	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	6

049/XII/ PPID/BJ N/2020	Sugianto	Dsn Ngembak RT. 019 RW. 006 Ds. Tambakrejo Kec. Kasiman	1. Berita Acara Kesepakatan Kades Sendangrejo Kec. Tambakrejo dengan BPD tentang Penyusunan RAPBDes, APBDes dan PapbDes Desa Sendangrejo Kec. Tambakrejo tahun anggaran 2019. 2. Surat permohonan Kades Sendangrejo kepada Camat Tambakrejo tentang Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes tahun anggaran 2019. 3. Surat Camat Tambakrejo kepada Kades Mojorejo tentang Hasil Evaluasi RAPBDes, APBDes tahun anggaran 2019.	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi	7
050/XII/ PPID/BJ N/2020	Zaenal Abidin	Ds. Kuniran RT. 3 RW.1 Kec. Purwosari	1. DPA APBDes Desa Kuniran Kec. Purwosari tahun 2017, 2018, 2019 Tahapan 1 dan Tahapan 2 tahun 2020 2. Berita Acara Lelang Tanah Kas Desa (TKD)	Kontrol Sosial Masyar akat	Terpenuhi lewat surat Camat	7

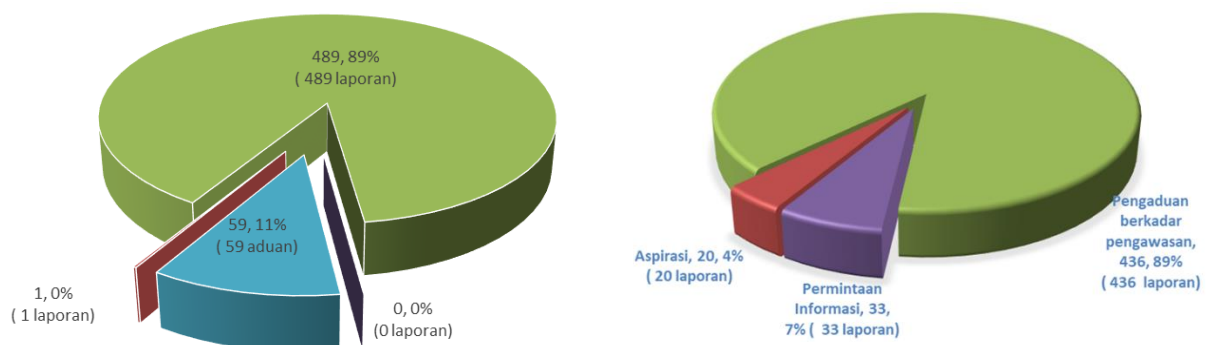
			Desa Kuniran Kec. Purwosari tahun 2017, 2018, 2019			
051/XII/ PPID/BJ N/2020	Combet- Combet	Indonesia			Sudah ditindak lanjutui dengan membalas email untuk melengkapi rincian dan tujuan pengguna informasi	1
052/XII/ PPID/BJ N/2020	Irawan	Dsn. Petak RT. 014 RW. 002 Kec. Kasiman	1. Berita Acara Kesepakatan Kades Ngujo Kec. Kalitidu dengan BPD tentang Penyusunan RAPBDes, APBDes dan PAPBDes Desa Ngujo Kec. Kalitidu tahun anggaran 2019. 2. Surat permohonan Kades kepada Camat Kalitidu tentang Evaluasi RAPBDes, APBDes dan PAPBDes tahun anggaran 2019.	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi lewat surat Camat	7
053/XII/P PID/BJN/ 2020	Labibul Umam	Dsn. Ketawang RT. 015 RW.004 Ds. Payaman Kec. Ngraho	1. Salinan Dokumen foto copy ralisasi Ds. Payaman Kec. Ngraho APBDes tahun anggaran 2018, 2019 dan	Kontrol Sosial dan Transparasi	Terpenuhi lewat surat Camat	2

			2020 2. Laporan Pertanggung jawaban APBDes, DD, ADD tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 3. Realisasi Laporan Lelang tanah bengkok tahun 2019 dan 2020			
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pemohon informasi melalui desk layanan informasi dari 53 (lima puluh tiga) pemohon informasi pada tahun 2020, yang berasal dari Masyarakat yang di gunakan untuk kontrol sosial atau publikasi, pemohon informasi berasal dari perseorangan/individu dokumen yang dimohon kebanyakan digunakan untuk bahan Kontrol sosial, pembelajaran dan penelitian, semua permohonan informasi terlayani dengan baik .

Permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2020 sebanyak 549 yang meliputi aspirasi 20 aduan, permintaan laporan 33 aduan dan Pengaduan berkadar pengawasan 436 aduan. Permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti OPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi LAPOR!1708 sebagai berikut:

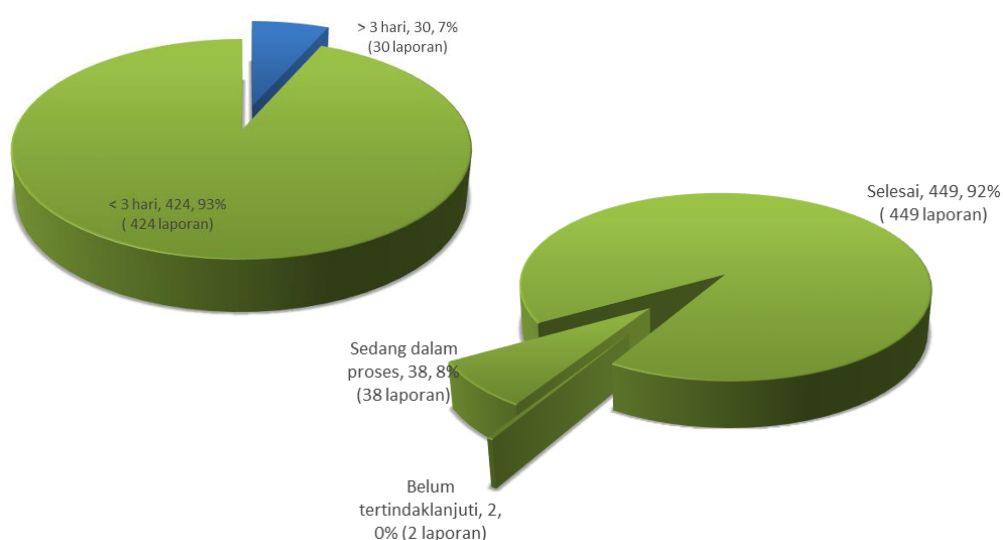
Gambar 14
Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708



Laporan yang masuk pada aplikasi SIAP LAPOR sebanyak 549 aduan, yang sudah dikoordinasikan serta didisposisikan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti dengan format serta data laporan yang jelas pada Tahun 2020 berjumlah **489** laporan dengan laju verifikasi kurang dari 3 hari 83%. Hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik.

Gambar 15

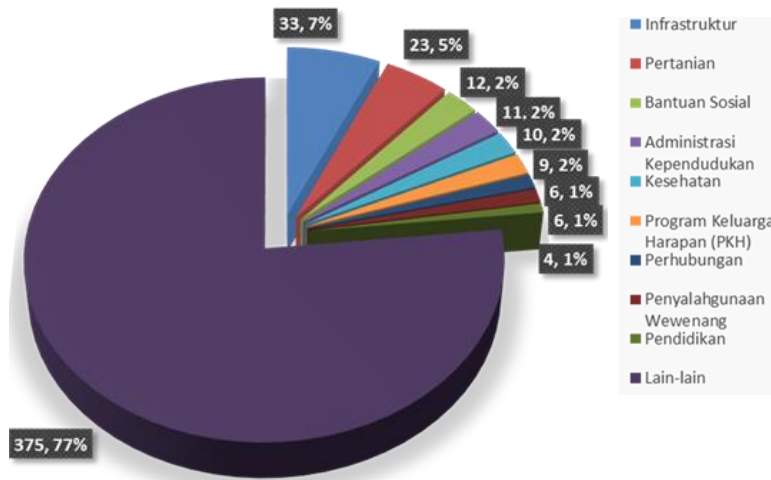
Laju Tindak Lanjut Permohonan Informasi Melalui LAPOR!1708



Topik Layanan informasi melalui LAPOR!1708 di tahun 2020 ini meliputi: Infrastruktur 7%, Pertanian 5%, Bantuan sosial 2%, Administrasi Kependudukan 2%, Kesehatan 2%, Program Keluarga Harapan, (PKH), Perhubungan 1%, Penyalahgunaan Wewenang 1%, Pendidikan 1% sedangkan sisanya 77% adalah topik terkait Bidang, Lingkungan Hidup, Kebudayaan dan pariwisata, perdagangan, dan lain-lain.

Gambar 16

Topik Permohonan Informasi dan OPD Terlapor Melalui SIAP - LAPOR!



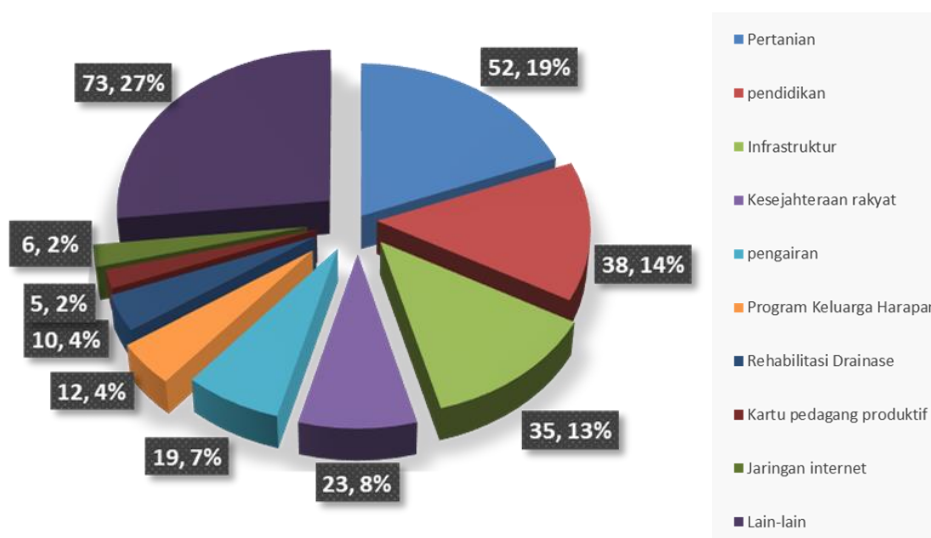
Untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat, telah dikembangkan acara Ayo Mas Bro (**Ayo Masyarakat Bojonegoro PRoduktif**) mulai pukul 08.00-09.30, dimana secara bergiliran Kepala OPD menyampaikan program dan informasi yang dikelola oleh OPD secara on-air kepada masyarakat. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi terhadap OPD yang menjadi narasumber, dengan menghubungi SMS/WA : 08113322958.

Operator/penyiar di Radio Malowopati sebanyak 7 (orang) orang menjangring laporan dari masyarakat melalui progam Unit Reaksi Cepat pengelolaan aduan dengan cara komunikasi melalui WhatsApp, SMS, dan telepon. Jam siar radio malowopati mulai jam 06:00 s/d 24:00 WIB.

Desk layanan informasi Forum Konsultasi Publik melalui Sambang Desa, pada tahun 2020 sebanyak 273 permohonan informasi dengan topik Pertanian 19%, pendidikan 14%, infrastruktur 13%, kesejahteraan rakyat 8%, pengairan 7%, Program Keluarga Harapan (PKH) 4%, Rehabilitasi drainase 4%, Kartu Pedagang Produktif 2%, jaringan internet 2%, lain-lain 27 %.

Gambar 17

Grafik Permohonan Informasi Melalui Forum Sambang Desa



Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melayani permohonan informasi melalui Media Sosial. Akun Media Sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Selain Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Media Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga melayani permohonan informasi dari masyarakat

Tabel 3

Alamat Medsos Pemkab Bojonegoro dan Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro

NO	MEDSOS	PEMKAB	DINKOMINFO
1	Facebook	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
2	Instagram	Bojonegoropemkab	dinkominfo_bjn
3	Twitter	@pemkab_bjn	@DinasKominfoBjn
4	Youtube	PEMKAB BOJONEGORO	KOMINFO BOJONEGORO

3. Sengketa Informasi Publik

Tahun 2020 ada 9 (sembilan) keberatan permohonan informasi dan tidak ada sengketa informasi publik. Semua permohonan informasi dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-undang

No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Tabel 4
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudan		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
9	9	0	0	0	0	0	0	0	0



4

HAMBATAN DAN CARA MENGATASINYA

Ada beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dan cara mengatasinya dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Faktor Internal

- Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi melalui *website* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan OPD serta produk-produk dalam bentuk *hard copy*, lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.
- Masih ada beberapa PPID OPD/Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus maupun berupa Focus Group Discussion (FGD), Bimtek maupun Rapat Penguatan PPID.
- Belum semua Pejabat/aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan.

Berkaitan hal tersebut PPID Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasikan secara terus menerus baik regulasi tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Selain itu perlu rutin diadakan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang masuk dalam kategori dikecualikan

- Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan.

Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu/OPD.

- Belum tersedianya sistem pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun data dalam bentuk file digital (softcopy).

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengoptimalkan tempat pengarsipan data hardcopy dan membuat sistem pengarsipan data.

2. Faktor Eksternal

- Kondisi Publik. salah satu kunci suksesnya dalam penerapan keterbukaan informasi adalah peran publik. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan.

Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada *website* OPD Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu/OPD sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di *website* maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan

negara. Selain itu perlu meningkatkan penyebaran informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, dll).

- Masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan

Perlu dibuat regulasi untuk melampirkan Term Of Reference (TOR) bagi pemohon informasi agar informasi yang diberikan tepat sasaran.

- Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi.

Perlu adanya perubahan regulasi yang mewajibkan pemohon informasi untuk memberikan umpan balik setelah menerima informasi.



5

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Komitmen untuk terus memperbaiki layanan informasi untuk tahun yang akan datang bagi PPID Utama Kabupaten Bojonegoro sangatlah penting apalagi di era digitalisasi saat ini. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan.

SDM yang mampu, terampil dan cakap dalam memberikan layanan serta menguasai informasi merupakan dukungan wajib PPID dalam meningkatkan Layanan . Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID baik untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu/OPD. Diharapkan di setiap satuan kerja memiliki *corner* untuk layanan informasi hal itu akan memberikan kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasinya melalui media-media yang disediakan.

Berdasarkan pengalaman dan capaian yang didapat pada tahun 2020 berharap kedepannya pelaksanaan Layanan Informasi PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus meningkat, Beberapa tindaklanjut dan rekomendasi, antara lain :

1. Regulasi

Regulasi adalah satu hal mendasar yang menjadi pedoman pelaksanaan PPID baik lingkup kabupaten, PPID pembantu (OPD) maupun PPID Pemerintah Desa.

Seiring dengan kompleksitas hal-hal yang ditangani oleh PPID, tentunya regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada dimana sampai dengan saat ini yang menjadi acuan utama regulasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki dasar pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (TGA) sesuai dengan misi ke-dua RPJMD Kabupaten Bojonegoro yang harus benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Regulasi pendukung dalam penguatan PPID Kabupaten juga perlu segera disahkan dan diimplementasikan, antara lain Peraturan Bupati Bojonegoro tentang masterplan smart city, Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro, serta Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Sistem Informasi Desa, yaitu dokumen yang merupakan satu dari Daftar Informasi Publik PPID Kabupaten Bojonegoro tahun 2021, selain itu juga sebagai petunjuk dalam bentuk integrasi sistem antara PPID utama dan PPID pembantu serta PPID Pemerintah Desa untuk saling memperkuat satu sama lain melalui layanan informasi berbasis elektronik.

Selain regulasi setingkat peraturan daerah dan peraturan bupati, beberapa aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga perlu dikuatkan, beberapa diantaranya adalah SOP tentang layanan informasi, SOP tentang kearsipan dokumen PPID dan SOP tentang Standar Layanan Informasi Publik di tingkat desa.

2. Kelembagaan

Dalam melayani sengketa informasi PPID Kabupaten Bojonegoro belajar dari pengalaman beberapa pemohon informasi, salah satu hal yang menjadi perhatian utama Komisi Informasi adalah penguasaan atas dokumentasi informasi yang dimohon, karena banyak kasus permohonan informasi yang secara kepemilikan PPID Kabupaten tidak dalam penguasaan dokumentasi informasi yang dimohonkan, namun ketika PPID utama mendelegasikan pelayanan informasi kepada PPID pembantu ataupun PPID desa, secara kelembagaan belum bisa ditangani dengan baik, apalagi saat ini yang permohonan paling banyak pada Pemerintah Desa. Beberapa kendala antara lain penguasaan terhadap substansi dokumen yang diminta serta eksistensi PPID pembantu dan PPID desa yang belum melaksanakan aktivitas pelayanan informasi secara rutin/ terus menerus sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pelayanan informasi.

Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas eksistensi dan konsistensi PPID utama, serta PPID pembantu dan PPID desa dalam memberikan layanan informasi. Beberapa program penguatan kelembagaan PPID dikuatkan antara lain di awal tahun 2021 surat Sekretaris Daerah tanggal 10 Maret 2021 Nomor 489/513/412.213/2021 Hal Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) dan publikasi keterbukaan informasi penyelenggaraan Daerah Tahun 2020 kepada OPD Se Kab. Bojonegoro dan Pemerintah Desa melalui Camat. Dimana laporan tersebut berisi informasi setiap saat sesuai dengan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan mempublikasikan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah tahun 2020 dan anggaran pendapatan belanja (APBD) tahun 2021 yang diunggah pada Website OPD maupun website desa, pemutakhiran profil pejabat, penguatan Desk Layanan Informasi, penanganan pengaduan/keberatan.

3. Sumber Daya Manusia

Selain regulasi dan kelembagaan, satu hal utama adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PPID, yang terkait didalamnya adalah unsur struktural tim PPID baik kabupaten, PPID SKPD maupun desa, juga tak kalah pentingnya petugas desk layanan informasi.

Petugas desk layanan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam pelayanan. Kami menyimpulkan beberapa langkah perbaikan dalam layanan informasi oleh desk layanan informasi berdasarkan pengalaman dari hal-hal yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, antara lain :

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja pemilik dokumentasi informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
2. Mengadakan penguatan Petugas PPID se – Kab. Bojonegoro.
3. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap satuan kerja;
4. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik;
5. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
6. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (*front desk*) dan pengelola informasi (*operator*), sehingga dapat memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Dari pengalaman tersebut PPID Kabupaten Bojonegoro telah menganggarkan beberapa kegiatan penguatan petugas desk layanan informasi antara lain :

1. Bimbingan teknis penguatan PPID dengan peserta ketua PPID OPD dan petugas desk layanan informasi OPD se - Kabupaten Bojonegoro.
2. Penguatan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) desa
3. Penguatan petugas admin aplikasi LAPOR! OPD se - Kabupaten Bojonegoro.
4. Monitoring dan evaluasi PPID OPD dan PPID Pemerintah Desa dimana PPID Pemerintah Desa melalui Pembinaan, pendampingan kunjungan dan pemantauan website desa.
5. Aktivasi aplikasi sekaligus pendampingan admin aplikasi Sistem Informasi Desa
6. Penguatan Kemitraan dan Kelompok Informasi Masyarakat untuk berkolaborasi di tingkat desa dalam implementasi PPID di tingkat desa



6

DOKUMENTASI

PENGHARGAAN

Pelaksanaan layanan informasi publik di tahun 2019 PPID Kabupaten Bojonegoro yang dalam ini dilaksanakan oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa kegiatan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

1. TOP Digital Transformation Readiness 2020 dalam TOP DIGITAL Awards 2020;
2. TOP Digital Implementation 2020 on District Government (Level Star 4) dalam TOP DIGITAL Awards 2020;
3. TOP Leader on Digital Implementation 2020 dalam TOP DIGITAL Awards 2020;
4. Kategori Outstanding Achievement urutan ke 4 dalam Top 46 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020.
5. Kategori Badan Publik Terbaik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2020;
6. Kategori Badan Publik Terinformatif Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2020;
7. Kategori Penyedia Informasi Berkala Terbaik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2020;
8. Kategori Laporan Tahunan Terbaik Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2020;
9. Kategori Penyedia Informasi Berkala Terbaik Desa se- Jawa Timur Tahun 2020 untuk Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2020;

10. Kategori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Desa se-Jawa Timur Tahun 2020 untuk Desa Prayungan Kecamatan sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2020;
11. Kategori Penyedia Layanan Informasi Terbaik Desa se-Jawa Timur Tahun 2020 untuk Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2020;
12. Kategori Badan Publik Menuju Informatif Desa Se-Jawa Timur Tahun 2020 untuk Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang dan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo dalam PPID Award Jawa Timur Tahun 2020.

Hak Anda Untuk Tahu!



TOP DIGITAL Awards 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/5541/bojonegoro-raih-3-penghargaan-di-ajang-top-digital-awards-2020>
- <https://klikjatim.com/selamat-pemkab-bojonegoro-sukses-borong-tiga-penghargaan-di-top-digital-awards-2020/>
- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/bojonegoro-raih-3-penghargaan-di-ajang-top-digital-awards-2020-1upo9MgglKa>

Hak Anda Untuk Tahu!



PPID Award 2020

- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/837>
- <http://ppid.bojonegorokab.go.id/bojonegoro-raih-8-penghargaan-pada-malam-anugerah-kip-ki-award-2020/>

WAWANCARA TOP 46 KOMPETISI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL



- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/baca/758>

PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020



- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/ba>

DESK LAYANAN INFORMASI PPID

PPID CORNER



GEDUNG PIP



MALL PELAYANAN PUBLIK

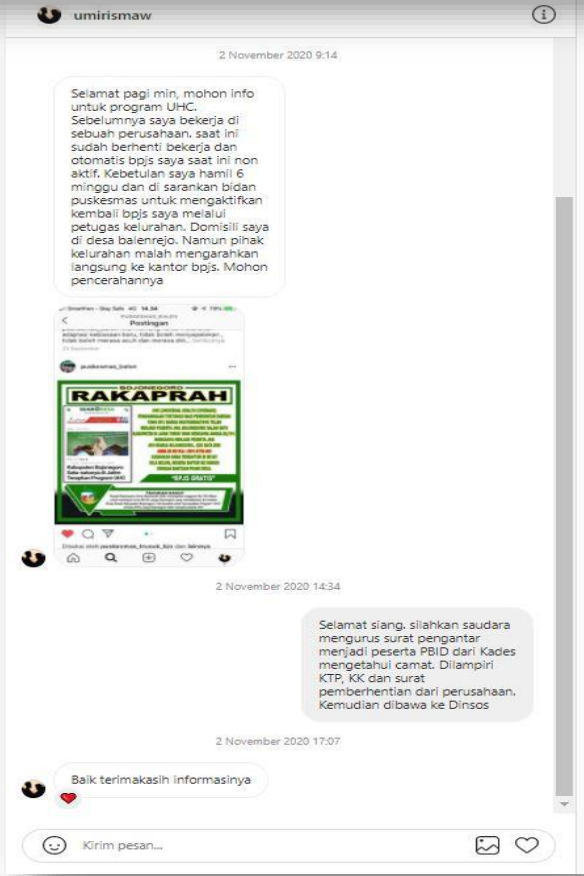
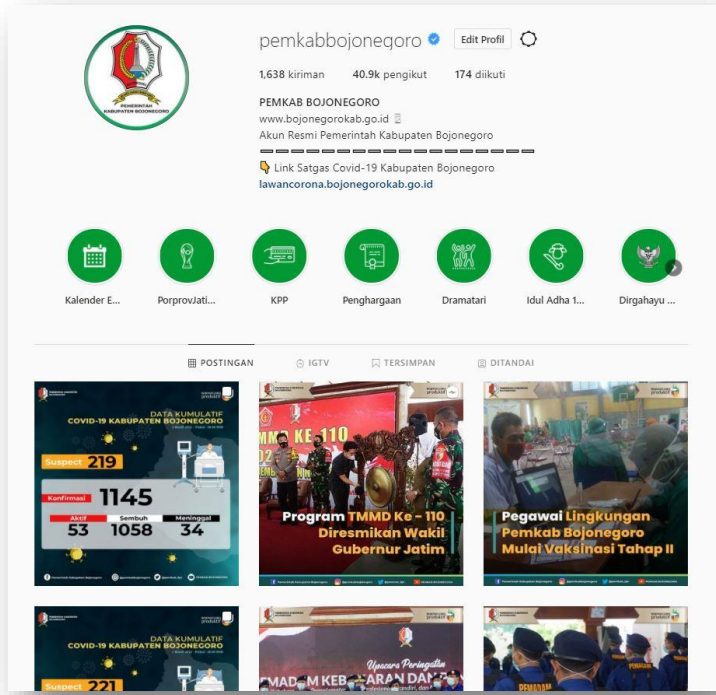


LPPL RADIO MALOWOPATI FM

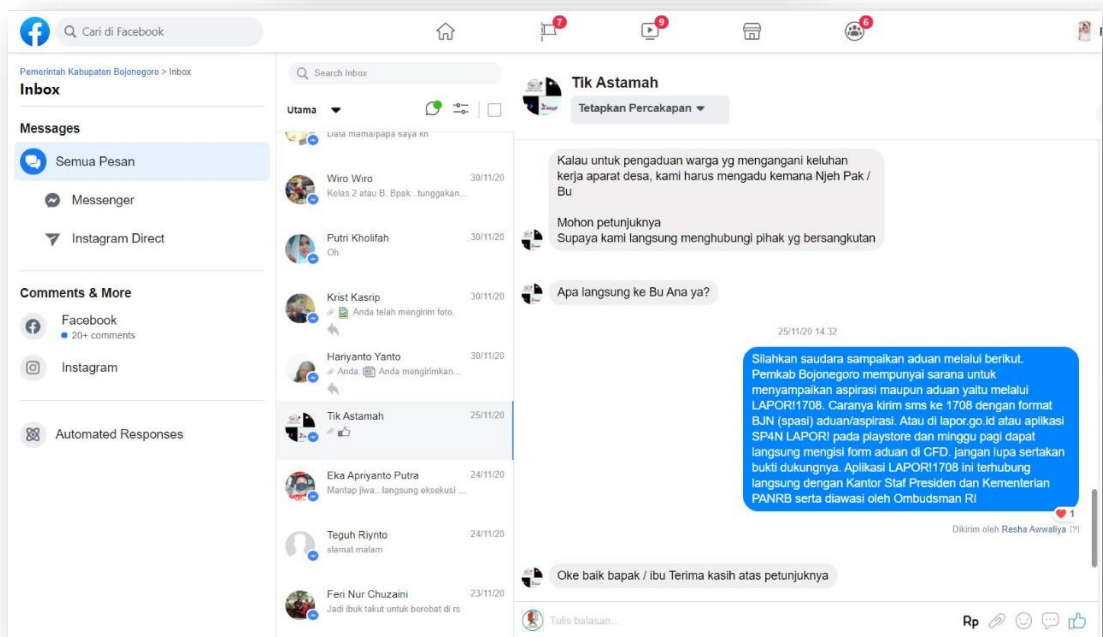


MEDIA SOSIAL

INSTAGRAM



FACEBOOK



TWITTER



Alamat Media Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:

NO	MEDSOS	PEMKAB	DINKOMINFO
1	Website	www.bojonegorokab.go.id	www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
2	Facebook	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
3	Instagram	bojonegoropemkab	dinkominfo_bjn
4	Twitter	@pemkab_bjn	@DinasKominfoBjn
5	Youtube	PEMKAB BOJONEGORO	KOMINFO BOJONEGORO

FORUM KOMUNIKASI PUBLIK



Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru, 7 Februari 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/4346/bupati-anna-awali-sambang-desa-tahun-2020-di-desa-pohwates>
- <http://infopublik.id/kategori/nusantara/403417/pembangunan-jalan-puk-sroyo-nglingo-dilanjutkan-tahun-ini>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/pembangunan-jalan-puk-sroyo-nglingo-dilanjutkan-tahun-ini/>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/atasi-masalah-sosial-pemkab-bojonegoro-gelontor-bansos>
- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/agenda/baca/310>
- <https://pohwates-bjn.desa.id/2020/02/18/bupati-bojonegoro-sambang-desa-pohwates/>
- <http://blokbojonegoro.com/2019/01/30/sinergikan-program-pemkab-bupati-sambang-desa/>
- <http://blokbojonegoro.com/2020/02/08/begini-penjelasan-terkait-jalan-belum-tuntas/>
- <https://beritabojonegoro.com/read/19278-serap-aspirasi-masyarakat-bupati-bojonegoro-sambang-desa-di-pohwates-kepohbaru.html>
- <http://www.sigap88news.com/2020/02/08/sambung-kopi-darat-melalui-sambang-desa/>
- <https://www.transbojonegoro.com/2020/02/pembangunan-jalan-th-2020-akan-terorientasi-di-kecamatan-kepohbaru-kanor-baureno/>
- <https://suarabojonegoro.com/news/2020/02/08/ini-penjelasan-bupati-bojonegoro-terkait-jalan-pohwates-nglingo>
- <https://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/bda/22599/20200723/bojonegoro-menjadi-kabupaten-pertama-di-jawa-timur-capai-uhc-layanan-jkn-kis>
- <https://wartaku.id/pemerintahan/jamkesda-dihapus-bojonegoro-terapkan-uhc-universal-health-care-mulai-februari-2020/>



Desa Cangaan Kecamatan Kanor, 12 Februari 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/4364/malam-ini-bupati-anna-sambang-desa-di-wilayah-kecamatan-kanor>
- <http://blokbojonegoro.com/2020/02/13/bupati-kpm-harus-sampai-di-petani/>
- <http://blokbojonegoro.com/2020/02/12/sambang-desa-bupati-wabup-di-canga-an/>
- <https://beritabojonegoro.com/read/19295-pemkab-bojonegoro-gelar-sambang-desa-di-desa-cangaan-kecamatan-kanor.html>
- [https://kumparan.com/kumparannews/bupati-bojonegoro-sosialisasi-
implementasi-program-kpm-dengan-cara-sambang-desa-1spf882BpTI](https://kumparan.com/kumparannews/bupati-bojonegoro-sosialisasi-implementasi-program-kpm-dengan-cara-sambang-desa-1spf882BpTI)
- <https://www.youtube.com/watch?v=ZKshRJ4YyzI>



Kecamatan Kota Bojonegoro, 27 Februari 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/4426/bupati-dan-wakil-bupati-sambang-des-di-wilayah-kecamatan-kota>
- <https://kabarpasti.com/kadin-pkp-cipta-karya-jelaskan-sejumlah-kegiatan-diacara-bupati-bojonegoro-sambang-des/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Puh3vxR6Jpc>



Desa Ngunut Kecamatan Dander, 6 Maret 2020

- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/688>
- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/pemkab-bojonegoro-harap-kelompok-tani-manfaatkan-teknologi-1syHRFbwbwJ>
- <https://www.youtube.com/watch?v=sdbj6MruRZI>



Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno, 12 Maret 2020

- <https://maspolin.id/2020/03/13/sambang-desa-bupati-bojonegoro-sapa-warga-dan-ajak-masyarakat-tlogoagung-berpola-hidup-bersih/>
- <https://wartaku.id/pemerintahan/dinas-pertanian-bojonegoro-anggarkan-75-miliar-untuk-program-kpm/>
- <http://www.sigap88news.com/2020/03/13/bupati-bojonegoro-dr-hj-ana-muawanah-gagas-best-information-program/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=qhQRnTLtRas>



Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo, 2 Juli 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/4928/pemkab-gelar-sambang-desa-di-kecamatan-margomulyo-dengan-tetap-jalankan-protokol-kesehatan>
- <https://suaradesa.co/headline/sambang-desa-bupati-anna-serap-aspirasi-masyarakat-di-masa-pandemi-covid-19/>



Desa Ngasinan Kecamatan Padangan, 24 Juli 2020

- <https://www.kanalbojonegoro.com/tahun-2020-121-km-jalan-poros-kecamatan-ditarget-selesai-dicor/>
- <http://infopublik.id/galeri/foto/detail/108925>
- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/agenda/baca/356>



Desa Bondol Kecamatan Ngambon, 8 September 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/5258/bupati-anna-di-sambang-des-serap-aspirasi-dari-persoalan-e-ktp-hingga-sampah>
- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/785>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/bupati-anna-di-sambang-des-serap-aspirasi-dari-persoalan-e-ktp-hingga-sampah/>



Desa Kending Kecamatan Kedungadem, 17 September 2020

- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/793>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/dinas-pertanian-bangun-irigasi-tercier-untuk-tingkatkan-produktivitas/>
- <https://suaradesa.co/desa-update/siapkan-rp35-miliar-untuk-peningkatan-infrastruktur-pengairan-di-kecamatan-kedungadem>
- <https://suaradesa.co/desa-update/dinas-pertanian-kabupaten-bojonegoro-sampaikan-komitmennya-di-sambang-desa/>
- <https://suaradesa.co/desa-update/kabupaten-bojonegoro-satu-satunya-di-jatim-terapkan-program-uhc/>
- <https://suaradesa.co/desa-update/bertahap-bupati-anna-tegaskan-penuntasan-pembangunan-infrastruktur-jalan-di-bojonegoro/>
- https://www.youtube.com/watch?v=DU3rMn3T_fA



Desa Miyono Kecamatan Sekar, 10 Oktober 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/5269/sambang-desa-ke-xii-bupati-bojonegoro-berdialog-dengan-warga-kecamatan-sekar>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/sambang-desa-cara-bupati-anna-sapa-warga/>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/pemkab-bojonegoro-beri-layanan-ib-gratis-bagi-sapi-ternak/>
- <http://infopublik.id/kategori/nusantara/480219/sambang-desa-cara-bupati-anna-sapa-warga>
- <https://beritabojonegoro.com/read/20621-bupati-bojonegoro-anna-muawanah-hadiri-sambang-desa-di-kecamatan-sekar.html>
- <https://damarinfo.com/bupati-bojonegoro-sapa-warga-kecamatan-sekar/>
- <https://suaradesa.co/desa-update/bupati-anna-awasi-dan-evaluasi-pembangunan-dengan-turun-langsung-melalui-sambang-desa/>
- <https://suaradesa.co/desa-update/sambang-desa-pemkab-bojonegoro-dorong-penguatan-modal-dan-teknologi-bumdes/>
- <https://bojonegorotoday.com/baca/10/09/2020/sambang-desa-bupati-sebagai-acuan-menentukan-kebijakan/>
- <http://www.sigap88news.com/2020/09/11/bupati-bojonegoro-sambang-desa-ke-xii-sapa-warga-kec-sekar/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HQuTa2nA32Y&t=3509s>



Desa Duyungan Kecamatan Sukosewu, 24 Oktober 2020

- <https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/815>
- <https://sukosewu.bojonegorokab.go.id/berita/baca/26>
- <https://kabarpasti.com/tambah-gayeng-sambang-desa-bupati-bojonegoro-fokus-masalah-petani/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7e902UJFsZs>



Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras, 07 November 2020

- <https://www.kanalbojonegoro.com/tahun-2021-pemkab-bojonegoro-mulai-garap-jalan-poros-desa/>
- <https://kedungdowo-sugihwaras.desa.id/first/artikel/Rk5uMXhDdTJoaGIUL0FFaUk0UXNTUT09>
- <https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-22930820/mulai-tahun-2021-pemkab-bojonegoro-bakal-aspal-jalan-poros-desa-hingga-1499-km>



Desa Sudu Kecamatan Gayam, 21 November 2020

- <https://bojonegorokab.go.id/berita/5482/186-desa-di-bojonegoro-telah-memiliki-bank-sampah>
- <https://www.kanalbojonegoro.com/186-desa-di-bojonegoro-telah-memiliki-bank-sampah/>
- <https://suarabanyuurip.com/kabar/baca/126-bayi-dan-28-ibu-melahirkan-di-bojonegoro-meninggal>
- <https://suarabanyuurip.com/kabar/baca/sambang-desa-bupati-anna-pecahkan-masalah-di-kecamatan-gayam>
- <https://www.youtube.com/watch?v=CtQQiRilrtA>



Desa Bakulan Kecamatan Temayang, 28 November 2020

- <https://www.kanalbojonegoro.com/dinas-pu-sda-bangun-cekdam-dan-longstorage-antisipasi-banjir-temayang/>
- https://www.youtube.com/watch?v=KhVGA_QrTXg
- <https://www.youtube.com/watch?v=zf-mwAqJK4>

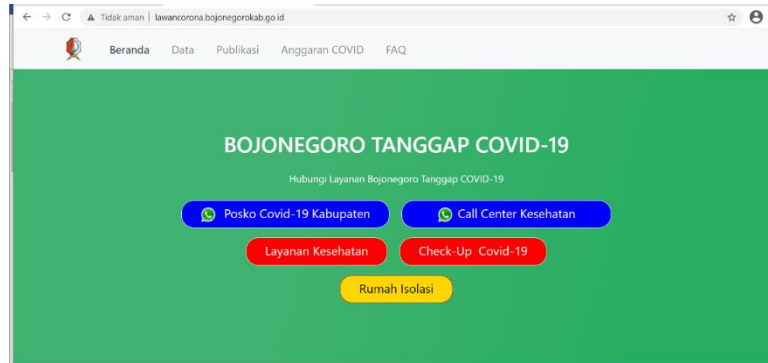
MEDIA CENTER BOJONEGORO



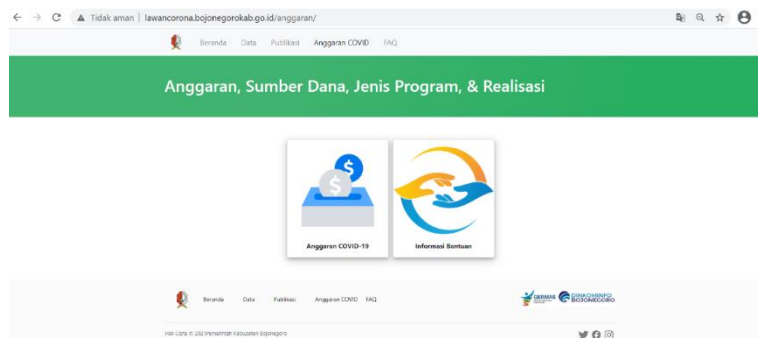
RUANG PLID



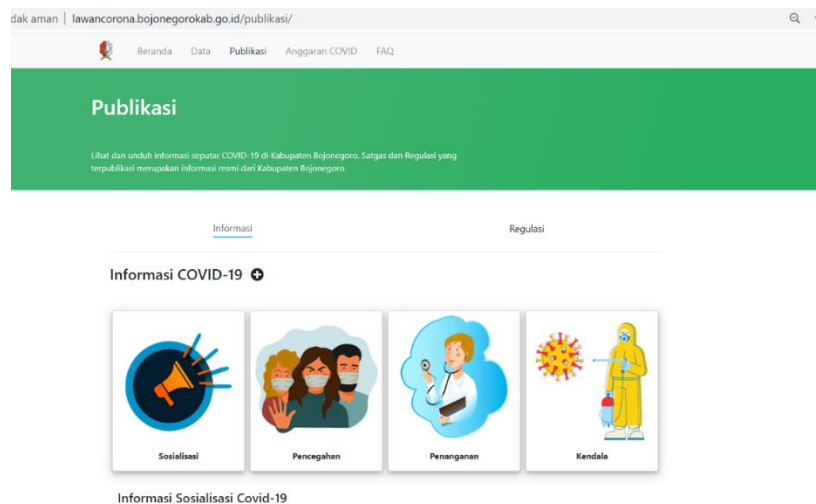
INFORMASI TERKAIT COVID-19



Dengan link : <http://lawancorona.bojonegorokab.go.id/>



Dengan link : <http://lawancorona.bojonegorokab.go.id/anggaran/>



Dengan link : <http://lawancorona.bojonegorokab.go.id/publikasi/>